

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN SMKN RENGEL  
DENGAN DUNIA USAHA / DUNIA INDUSTRI**

**Muhammad Ainul Yaqin**  
[ainul.yaqin39@gmail.com](mailto:ainul.yaqin39@gmail.com)  
SMK Rengel

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kemitraan antara SMKN Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Penelitian ini juga untuk mendeskripsikan factor factor yang mendorong dan menghambat kemitraan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kemitraan merupakan aktivitas semua rencana untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff, serta membuat organisasi berkembang secara dinamis. Beberapa implikasi yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat memperkuat teori bahwa kemampuan yang dimiliki mutu lulusan kompetensi lulusan dapat berupa kemampuan yang dimiliki lulusan dicirikan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat ditampilkan serta dapat dilihat dari lulusan yang langsung bekerja.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kemitraan, SMK, dunia usaha/ dunia industri

## PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) merupakan bentuk pendidikan kejuruan pada jenjang menengah. Menurut Haman (2004:23) kemitraan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh satu atau dua orang yang berbagi keuntungan atau kerugian. Kemitraan menjadi sarana untuk mendapatkan manfaat nilai bagi pihak pihak yang berkepentingan. Todd (2007:5) menyatakan kemitraan sekolah bisa dilakukan dengan murid, orang tua dan industri atau lingkungan profesional.

SMK melakukan kemitraan karena SMK merupakan pendidikan dengan sistem ganda yang merupakan kombinasi antara pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan pelaksanaan magang di dunia usaha dan industri. Kondisi saat ini secara umum terjadi semacam *miss match* antara *demand side* dan *supply*. Sebenarnya lowongan kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Selain itu, ada kesan akses lebih diutamakan. Pembangunan sekolah gencar di berbagai wilayah tapi tidak diikuti tata kelola yang baik termasuk laboratorium yang tidak *up to date*.

Kenyataan keterserapan lulusan SMK di dunia usaha/dunia industri (selanjutnya disingkat DU/DI) yang relevan masih sangat rendah. Hal ini sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sampai bulan Agustus 2016 sekitar 11,24% lulusan SMK yang menganggur (*sumber: sakernas, BPS*). Data tersebut pula disebutkan bahwa angka pengangguran terdidik terbesar di Indonesia adalah berasal dari lulusan SMK.

Berdasarkan data tentang tingkat

pengangguran di Indonesia di peroleh informasi sebagai berikut: jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2017 adalah 7,02 juta orang berkurang 430.000 orang dibandingkan posisi Februari 2016. Pengangguran terbanyak adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2016. Bisa diartikan pada setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK, ada sekitar 9 hingga 10 orang yang masih menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka terendah adalah pada pendidikan SD ke bawah dengan angka 3,44% dari jumlah angkatan kerjanya," ujar Suryamin. Berikut rincian tingkat pengangguran terbuka yaitu SD ke bawah 3,44%, SMP 5,76%, SMA 6,95%, dan SMK 9,84%. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mencatat, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terbanyak menganggur dan belum mendapat tempat bekerja. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 10 persen dari 7,01 juta orang berstatus pengangguran, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018. Dilihat dari data angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, mayoritas itu lulusan SMK, nomor dua lulusan SMA, dan ketiga Politeknik. Lulusan SMK banyak yang menganggur, ini memang unik. Kenapa malah justru lulusan SMK yang banyak menganggur, padahal mereka lulusan siap pakai di dunia kerja. Tingginya jumlah pengangguran dari lulusan SMK, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018. Dari data Badan Pusat Statistik periode Februari 2018 itu, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran.

Jumlah SMK di seluruh Indonesia sekitar 13.710 sekolah, tetapi guru

produktif hanya 22 persen. Guru produktif ialah guru yang mengajar mata pelajaran jurusan. Sedangkan 78 persen terkait mata pelajaran lain seperti agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan. Tak hanya jumlah, persoalan guru ini juga terkait kompetensi. Mungkin guru tersebut memang mampu mata pelajaran produktif tetapi kadang latar belakang pendidikan tak sesuai. Kemungkinan lainnya, latar belakang mendukung, tapi sang guru tak pernah terjun ke lapangan, padahal sekolah kejuruan menuntut anak untuk terlibat aktif bukan duduk, mendengarkan dan menulis.

Data SMK di Provinsi Jawa Timur berjumlah 1,225, Negeri 224 dan Swasta 1.001. SMK di Kabupaten Tuban jumlah Negeri 9 dan Swasta 34, Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang lulusannya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. SMK merupakan pendidikan dengan sistem ganda yang merupakan kombinasi antara pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan pelaksanaan magang di dunia usaha dan industri. SMKN Rengel melaksanakan kerjasama tidak hanya di kabupaten saja tetapi juga melakukan kerjasama di provinsi, dan SMKN Rengel telah terakreditasi A.

Penelitian ini melihat pada alumni SMK yang bekerja khususnya SMKN Rengel, Rengel Tuban. SMK ini memiliki 7 kejuruan yaitu teknik pengelasan, teknik kendaraan ringan, teknik computer jaringan, tata busana, teknik dan bisnis sepeda motor, Akutansi, multimedia. SMK pada umumnya selalu berdiri dengan jurusan utamanya otomotif dan multimedia, tetapi pada SMKN Rengel berdiri dengan bukan unggulan jurusan otomotif.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Thomas R. Dye (1981) menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Easton (1969) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Anderson (1975) menyatakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Hakim (2003) mengemukakan studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan

manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah ditetapkan dan legitimasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatir (1983:4) menyatakan implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat. Oleh Van Meter & Han Horn (1975:447) implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Kemudian Vresman dan Wildabski mendefinisikan implementasi sebagai sebuah proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Dari definisi tersebut tersirat adanya upaya tranformasi keputusan kebijakan ke dalam suatu tindakan atau kegiatan oprasional untuk mencapai perubahan seperti yang di harapkan dalam tujuan kebijakan.

Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan disahkannya kebijakan, dimulai dengan intepretasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini merujuk pada pemikiran, bahwa implementasi kebijakan mengandung logika yang *top down*, yakni menurunkan alternative kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan yang konkrit atau mikro (Wibawa,1994:35). Menurut Anderson dalam Fadillah Putra (2003:82) implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakikat

dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, efek dan dampak dari implementasi kebijakan.

### **Kerja Sama SMK Dengan Du/Di**

Dasar aturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peninggkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dindonesia. Kepmendikbud Nomor 0490/1992 tentang Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) yang bertujuan meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan saling menguntungkan dan dengan dasar kebijakan Mendikbud tersebut dirumuskan kebijakan bersama antara Mendikbud dan Ketua Umum Kadin dengan Nomor 0267a/U/1994 dan Nomor 84/KU/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tingkat Pusat disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Tingkat Wilayah disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi (MPKP), dan tingkat sekolah disebut Majelis Sekolah (MS). Dan untuk menindaklajuti kebijakan tersebut telah terbit Kepmendikbud No.323/1996 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG) yang didalamnya memuat kebijakan kemitraan SMK dan dunia usaha industri (Dudi). Dalam rangka praktik industri, kebijakan tersebut tetap berlangsung walaupun terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pengelolaan pendidikan.

Kerja sama dapat dilakukan dengan orang yang berada di lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam penyelenggara pendidikan, sekolah kejuruan ini menjalin kerjasama baik anggota internal maupun eksternal sekolah, kerjasama yang dijalin bersifat formal dan informal. Rohiat (2010:67) mengemukakan "esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan

dari masyarakat, terutama dukungan moral dan industri. Dalam arti sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah disentralisasikan sejak lama”.

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal dilakukan dengan DU/DI, bersifat kemitraan dalam kegiatan prakerin. Hubungan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait telah dilakukan dengan baik, seperti pemberian rekomendasai, melakukan kegiatan bersama, ndust dukungan dana untuk pengadaan fasilitas, dukungan industri dalam pembentukan berbagai diklat sekolah, memberika isentif kepada guru, dan memberikan gaji guru kontrak. Hubungan kerjasama dengan majelis sekolah dan orang tua siswa pada dasarnya cukup mendukung, seperti melakukan promosi sekolah secara bersama, menyetujui kegiatan sekolah.

Untuk proses kesepakatan antara sekolah dengan perusahaan dalam menjalin kerjasama langkah-langkah yang dilakukan sekolah. Pertama, sekolah mengkonfirmasi via telepon terlebih dahulu kepada perusahaan yang ingin diajak kerjasama di dalam rapat sekolah tadi, jika perusahaan memberikan sinyal menyetujui untuk melihat promosi dan presentasi sekolah, maka sekolah akan mengirimkan proposal serta surat pemberitahuan dari sekolah. Jika perusahaan atau industri mengirimkan surat balasan konfirmasi, sekolah baru akan industri ke perusahaan untuk mempresentasikan materi promosi sekolah yang sudah disiapkan. Perusahaan atau industri yang sudah menyetujui ada penandatanganan perjanjian kerjasama berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) antara sekolah dengan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Kemitraan SMK dengan dunia Industri dan dunia Usaha di SMKN Rengel. Penelitian ini di lakukan oleh Peneliti di Sekolah SMK Negeri Rengel yang ada di jl. Kalisat No.1 Desa Punggulrejo Kec Rengel Kab Tuban. Alasan Pemilihan lokasi penelitian di karenakan SMK Negeri Rengel sudah banyak menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga SMK Negeri Rengel ini dapat di jadikan rujukan oleh sekolah lain dalam hal kerja sama dengan DU/DI. Dan SMK Negeri Rengel ini mejadi sekolah model dalam mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

SMK Negeri Rengel didirikan pada 26 Juni 2006 dengan alamat di Jl. Kalisat, No. 01 Punggulrejo - Rengel - Tuban. Program studi terdiri dari Teknologi Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Akuntansi dan Keuangan, Tata Busana. Di dalam data Kemitraan SMK Negeri Rengel ada sekitar 93 DU/DI, dan Data Siswa yang terserap sekitar 194 siswa yang terdeteksi sekolah yang lain masih banyak yang tidak ter data oleh sekolah.

Teguh selaku Humas mengatakan perencanaan di intern sekolah dengan cara:

**Humas Mengusulkan Draft kegiatan RKAS ke WMM(Wakil Kepala Sekolah Managmen Mutu) terlebih dahulu setelah itu Pembahasan Draft RKAS oleh Kepala sekolah, WMM, ketika Draft sudah di bahas dan di setujui oleh kepala sekolah kemudian WMM menyerahkan kembali Draft ke Humas dan menyujui isi Draft tersebut baru kemudia Humas melaksanakan apa**

### **yang ada di dalam isi draft tersebut**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sekolah Harus mengusulkan draft terlebih dahulu kepada managemen mutu baru ada pembahasan lebih lanjut

Teguh selaku Humas mengatakan proses negosiasi dengan pihak Du/Di ada dua cara :

**Humas Datang langsung ke pihak Du/Di menemui Pimpinan Du/Di menyampaikan proposal kerjasama koordinasi pelaksanaan kerjasama (Du/Di kecil ). Sekolah menghubungi HRD secara personal, terdiri dari membuat janji pertemuan, menyampaikan program sekolah (berupa PKL, Rekrutmen, peningkatan kompetensi guru dan siswa), dan koordinasi pelaksanaan.**

Melihat dari hasil wawancara ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan dalam penanganan antara Du/Di kecil dan Du/Di yang sudah besar

Teguh sebagai Humas mengatakan cara dalam mengadakan MoU yaitu:

**Sekolah memilih Dunia industri yang sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah. Menawarkan MoU dengan memberi pilihan Du/Di, pkl recruitment, Guru tamu, kelas industry dan sinkronisasi kurikulum. Negoisasi dengan Du/Di untuk memilih salah satu dari MoU. Kesepakatan point-point MoU yang di tuangkan pada draft MoU. Revisi MoU di kedua belah pihak. Penanda Tangan MoU bermaterai. Pelaksanaan MoU.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa

kesepakatan tidak langsung bisa di jalankan karna masih ada beberapa revisi yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Dunia industri membuka rekrutmen kepegawaian melalui sekolah sekolah rekanan untuk memberi uji kepada siswa siswi untuk bisa diterima dalam bekerja di perusahaan ada beberapa tahapan dalam rekrutmen ini.

Sekolah menawarkan kepada seluruh siswa kelas XII untuk mengikuti recruitment sekolah. Sekolah memberikan list siapa yang mau ikut dalam rekrutimen. DU/DI melaksanakan seleksi dengan memberikan test tulis dan wawancara. DU/DI mentukan siswa yang terpilih sesuai hasil seleksi, dan penempatan kerja. Berdasarkan informasi dari beberapa informan peneliti menemukan kesimpulan bahwa masih adanya hubungan yang baik antara alumni dengan pihak sekolah sehingga alumni masih di beri kesempatan atau masih tetap di arahkan untuk mengikuti seleksi BKK untuk bisa bekerja.

### **Faktor pendukung**

Menurut Basuki selaku Kepala Sekolah kekuatan dalam proses kerja sama yaitu:

**Di dukung SDM yang unggul baik guru maupun siswa. Faktor geografis di daerah Tuban yang jarang ada jurusan yang sama dengan jurusan di SMK Negeri Rengel Contohnya Jurusan pengelasan di Tuban Cuma ada SMK Negeri Rengel dan SMKS TJP jadi peluang lebih besar contoh TBSM peluang lebih besar karna hanya ada dua di Tuban. Banyak DU/DI yang mulai berkembang dan merata di setiap wilayah Tuban (misal bengkel Resmi AHAS) bengkel las, mobil, maupun konfeksi pakaian**

Basuki selaku Kepala Sekolah juga menyatakan mengenai peluang sebagai

berikut:

Ada dorongan dari Dinas Pendidikan untuk memperbanyak kerjasama dengan DU/DI untuk meningkatkan daya saing tamatan di dunia global. Adanya permintaan dari Dunia Industry terutama untuk Ekspansi usaha terutama di bidang jasa dan produksi serta peluang perekrutan tenaga kerja untuk mengisi jabatan/lowongan yang ada di DU/DI.

#### Faktor penghambat

Basuki selaku Kepala Sekolah mengatakan kelemahan dalam menjalin kerja sama dengan DU/DI yaitu :

**Penempatan peserta didik di tempat prakerin yang tidak sesuai dengan program studi yang diambil.** Pembimbing kurang teliti terhadap potensi yang dimiliki peserta didiknya sehingga banyak terjadi hambatan. Adanya campur tangan pihak ke tiga (orang tua peserta didik) yang langsung mengajukan komplainnya kepada DU/DI. Adanya perusahaan yang bangkrut (pailit) yang mengakibatkan peserta didik dikembalikan ke sekolah. Peserta didik yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan DU/DI, sehingga peserta didik sering membolos saat prakerin. Sekolah tidak dapat memastikan pengiriman peserta didik di tiap tahapan prakerin selalu berpotensi baik. Komunikasi antara sekolah dan DU/DI memerlukan jembatan untuk saling

bekerja sama misalnya di motori oleh dinas Pendidikan maupun dinas ketenaga kerjaan supaya ada titik temu antara kebutuhan industry dengan program sekolah. Keterbukaan DU/DI untuk menjalin kerja sama dengan sekolah masih kurang. sering terjadi miss komunikasi antara pihak DU/DI dengan pihak sekolah. tidak sesuainya kompetensi yang di butuhkan di DU/DI dengan kompetensi yang ada di sekolah karna sekolah lebih mengacu ke kurikulum yang telah di tentukan.

Basuki selaku Kepala Sekolah mengatakan ada beberapa tantangan dalam menjalin kerja sama dengan DU/DI yaitu:

Sekolah harus memperbanyak jaringan dengan HRD dari beberapa DU/DI untuk mempromosikan sekolah agar mudah untuk kerja sama. Membutuhkan komitmen yang kuat *stakeholder* sekolah mulai dari kepala sekolah, waka, kakomli, dan guru produktif untuk menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan industri. Membutuhkan komunikasi yang intens dan rutin dengan DU/DI agar kerja sama yang sudah terjalin lebih berkembang dan meningkat.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sekolah harus mengusulkan draft terlebih dahulu kepada managemen mutu baru ada pembahasan lebih lanjut karna perlu adanya penyesuaian dari beberapa aspek seperti biaya, kesesuaian kurikulum, kesesuaian

program sekolah dengan program DU/DI.

Ada perbedaan dalam penanganan antara Du/Di kecil dan Du/Di yang sudah besar yang di maksud dengan DU/DI kecil adalah DU/DI seperti konfeksi kecil yang berada di daerah sekitaran Tuban saja dan yang di maksud dengan DU/DI besar yaitu DU/DI yang bersekala besar seperti perusahaan perusahaan di luar daerah Tuban seperti contoh PT MEDION, PT PAL PT. AHM Jakarta, PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT. INKASA JAYA ALUMINIUM, PT. KEMILAU GROUP dan lain sebagainya.

Kesepakatan tidak langsung bisa di jalankan karna masih ada beberapa revisi yang harus di jalani oleh kedua belah pihak karna MoU harus sama sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Humas wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada semua yang bersangkutan contoh seperti kepala sekolah, waka, kakomli, dan guru produktif untuk menindak lanjuti kesepakatan yang ada di dalam draft MoU.

Pelaksanaan kemitraan SMKN Rengel dengan dunia usaha dan dunia industry dibuatkan MoU yang isinya sesuai bidang kerjasama yang disepakati antara lain sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, guru tamu, prakerin, uji kompetensi kejuruan (UKK), OJT atau magang guru produktif, bantuan peralatan praktik, pendanaan sekolah dan beapeserta didik dari industri, unit produksi, sertifikasi dan recruitment/penempatan tamatan. Dalam kenyataannya penempatan lulusan dalam bekerja belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan bidangnya. Dalam penelitian ini pelaksanaan kemitraan masih kurang optimal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Okpor, Ikechukwu; Najimu, Hassan (2012) yang menghasilkan temuan bahwa kemitraan sektor swasta dalam pendidikan menjadi alat demi tercapainya pembangunan di suatu negara khususnya bidang pendidikan untuk menyiapkan dan pengembangan keterampilan dalam meningkatkan sumber daya manusia

melalui pelatihan kerja. Berdasarkan kenyataan bahwa sebagian lulusan SMK yang telah bekerja di industri kurangmampu beradaptasi dengan lingkungan dan sarana prasarana yang ada di industri serta belum sesuai tamatan yang bekerja sesuai dengankompetensi yang dimiliki, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedangdihadapi di industri yang selaras denganbidangnya, bahkan kurang tepat dalammengoperasikan sarana yang sewajarnya dikuasai. Pengendalian program kemitraan yang dapat diberikan adalah dengan mempekerjakan pesertadidik di perusahaan atau industri yang ada disekitarnya.

Untuk menyiapkan lulusan yang berdayaguna dan mampu bersaing, sekolah mengadakan Praktik Kerja Industri sebagai tahap membekali peserta didik tentang dunia kerja yangsesungguhnya dengan melalui cara: 1) Program pelatihan yakni SMK membekali seluruh pesertadidik yang akan melaksanakan Prakerin/pemagangan sebelum mereka magang diperusahaan nanti dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat peserta didik tertib dan bernilai baik ketika memasuki industri. 2) Program Pemagangan yakni peserta didik SMKN Rengel mempunyai waktu selama 2 bulan untuk melaksanakan praktek kerja industri (Prakerin). Temuan ini sejalan dengan pendapat Rohiat,(2012) bahwa untuk pengembangan pendidikan strategi yang dilakukan adalah melaksanakan workshop/pelatihan secara internal sekolah, melakukan kerjasama dengan komite, melakukan kerjasama dengan LPTK/instansi lain yang relevandan melakukan kerjasama dengan dunia usaha/industri. Melalui kegiatan tersebut pesertadidik berkesempatan belajar dan memperoleh pengalaman praktik kerja yang sesungguhnya. Hal ini dapat terlaksana apabila lembaga pendidikan dan dunia usaha/industri bekerja sama, di mana lembaga pendidikan membekali pesertadidik dengan pengetahuan teoritis,



sedangkan dunia usaha/industri membekali mereka dengan pengetahuan praktis melalui pengalaman latihan dalam praktek kerja sesungguhnya. Dalam hal ini penajaman dan kejelasan dalam pembuatannya apakah kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) antara sekolah dengan Du/Di perlu pemahaman dan kesamaan pendapat untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Prosedur yang diterapkan di DU/DI dan sekolah ini sudah sangat lengkap sesuai aturan yang ada. Jadi ada beberapa DU/DI yang memang sudah link and match dengan program yang ada di sekolah dan ada DU/DI yang belum nah yang belum inilah yang harus disesuaikan agar program sekolah bisa memenuhi kebutuhan DU/DI

Melihat dari pengamatan peneliti mengamati walaupun alumni sudah dinyatakan lolos dalam hal pemberkasan tapi masih ada kendala dengan test kesehatan jadi semua harus memenuhi syarat agar dapat diterima kerja di DU/DI. Kriteria kriteria ini diterapkan dalam perekrutan di karenakan pihak DU/DI pun ingin perusahaannya mejadi lebih bagus dengan ditunjang SDM yang bagus pula makanya dalam melaksanakan perekrutan harus melalui beberapa tahap seleksi.

Masih adanya hubungan yang baik antara alumni dengan pihak sekolah sehingga alumni masih diberi kesempatan atau masih tetap diarahkan untuk mengikuti seleksi BKK Untuk Bisa Bekerja di SMK Negeri Rengel ini hubungan BKK dengan DU/DI sangat baik jadi selalu ada permintaan tenaga dari DU/DI ke SMK Negeri Rengel. SMK Negeri Rengel punya banyak mendapat kekuatan dari beberapa factor contoh di Tuban hanya ada dua Sekolah yang Punya jurusan yang sama di SMK Negeri Rengel Sendiri dan di SMKS TJP inilah yang menjadi kekuatan bagi pelaksanaan kemitraan dengan DU/DIP.

Peluang yang ada sangat bagus bagi SMK Negeri Rengel karna justru pihak DU/DI lah yang meminta untuk bekerja sama karna pihak DU/DI juga

membutuhkan tenaga kerja yang terlatih untuk menempati jabatan yang ada di DU/DI. dengan adanya dukungan dan dorongan juga dari dinas pemerintah kepada SMK Negeri Rengel ini untuk selalu menjalin kerja sama dengan pihak DU/DI. Ini yang menjadikan peluang yang lebih dari pada sekolah sekolah yang tidak pernah tersentuh oleh dinas pemerintah.

Seharusnya sekolah harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh DU/DI di karenakan tujuan dari sekolah kejuruan itu untuk memenuhi kebutuhan DU/DI, jadi jangan sampai terjadi ada kelemahan kelemahan seperti Penempatan peserta didik di tempat prakerin yang tidak sesuai dengan program studi yang diambil. Pembimbing kurang teliti terhadap potensi yang dimiliki peserta didiknya sehingga banyak terjadi hambatan.

Memang tantangan ini kalo bisa di tempuh dan di realisasikan sekolah bisa lebih bagus lagi dalam hal kerja sama dengan adanya penanganan yang lebih intens lagi, Sekolah harus memperbanyak jaringan dengan HRD dari beberapa DU/DI untuk mempromosikan sekolah agar mudah untuk kerja sama, membutuhkan komitmen yang kuat *stake holder* sekolah mulai dari kepala sekolah, waka, kakomli, dan guru produktif untuk menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan industri.

## SIMPULAN

Perencanaan pada kegiatan awal dari proses kegiatan yaitu merencanakan tujuan dari perencanaan sebagai acuan untuk mengerjakan suatu guna mencapai tujuan organisasi, menganalisis situasi dan identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, menentukan tujuan program, dan menyusun rencana operasional.

Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia, sehingga tujuan organisasi harus dipahami oleh staff, mendistribusikan pekerjaan ke staff secara jelas, menentukan prosedur staff, dan mendelegasikan wewenang untuk semua

staff.

Pelaksanaan merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff, serta membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Proses evaluasi bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan, menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil standar, melakukan tindakan perbaikan serta, meninjau dan menganalisis ulang rencana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Persadi: Ujung Pandang.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Arifin, Zainal. 2012. *Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu SMK*. Jurnal Adminisistrasi Pendidikan Vol.Xiv No.1 April 2012 | 61-62. Diakses Pada Tanggal 01 April 2018 Pukul 20.30 WIB
- Alobiedat. A. 2010. *The Effectiveness of the School Performance, by Using the Total Quality Standards within the Education District of Al-Petra Province, from the Perspective of the Public Schools Principals and Teacher*. *International Education Studies*. 4 (2), hlm. 31-40. Diakses Pada Tanggal 02 desember 2020 Pukul 21.00 WIB
- Arikunto, dkk. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azizah, Murniati, dan Khairuddin. 2015. *Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Du/Di) Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pada SMK Negeri 3 Banda Aceh*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. ISSN 2302-0156. Volume 3, No. 2, Mei 2015 | 11. Di akses pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 21.30 WIB
- Brigitta Putri Atika Tyagita dan Kristiana Hesti Padmini. 2015. *Edupreneur dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK*. Sebelas Maret Surakarta ISBN: 978-602-8580-19-9. Di akses pada tanggal 20 Desember Pukul 21.40 WIB.
- Cipto, Hendra. 2017. *Kemenaker: Alumni SMK Terbanyak Menganggur*. KOMPAS.com: Kontributor Makassar
- Daud, Denny. 2013. *Promosi Dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Pembiayaan Pada PT. Bess Finance Manado*. *Jurnal Emba*, 51 Vol.1 No.4. Diakses Pada Tanggal 05 November 2020 Pukul 20.40 WIB
- Engkoswara dan Komariah, Aan. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung:
- Eisler, Rione & Mantuori, Alfonso. 2001. *The Partnership Organization: A System Approach*. *OD Practitioner*, Vol. 33, No. 2, 2001.
- Ellers, N. Angela. 2002. *School-Linked Collaborative Services and System Chang. Linking Public Agencies. With Public Administrator & Society*, Vol. 34, No. 3, Juli 2002, 285-308.
- Evans, Ruperts N. 1997. *Foundations of Vocational Education*. Columbus: OH Nerril.

Fadjar, A. Malik. 2005. *Holistik Pemikiran Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Fiske, E, B. 1996. *Decentralization of Education: Politics and Consensus*. IBRD/The World Bank. Washington D.C.

M.Yunus, Abbas. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Kemitraan Untuk Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Lulusan SMK*.